PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN BERBEK

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRIBULAN I (LAPTRI I)

TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

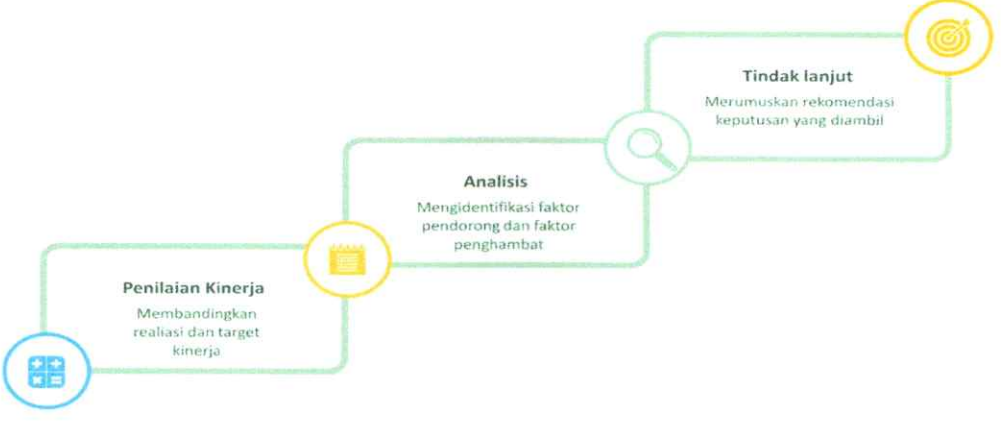
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
6. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

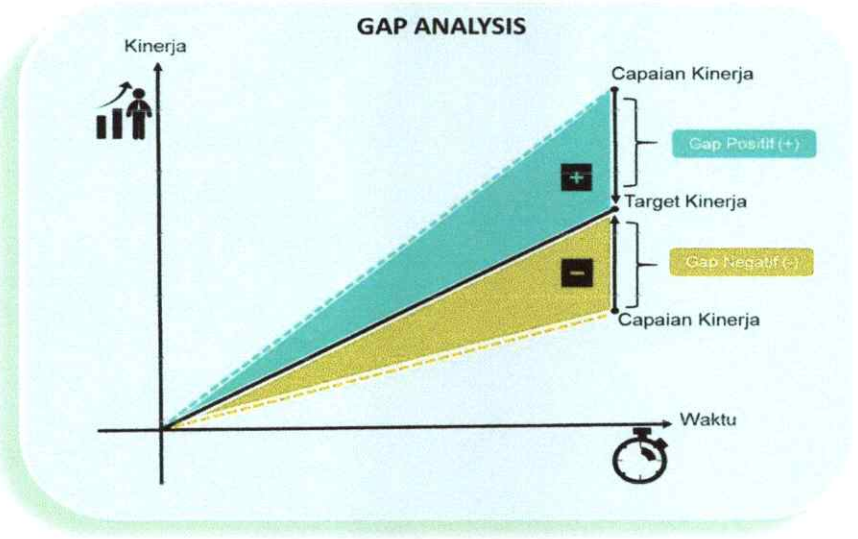
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



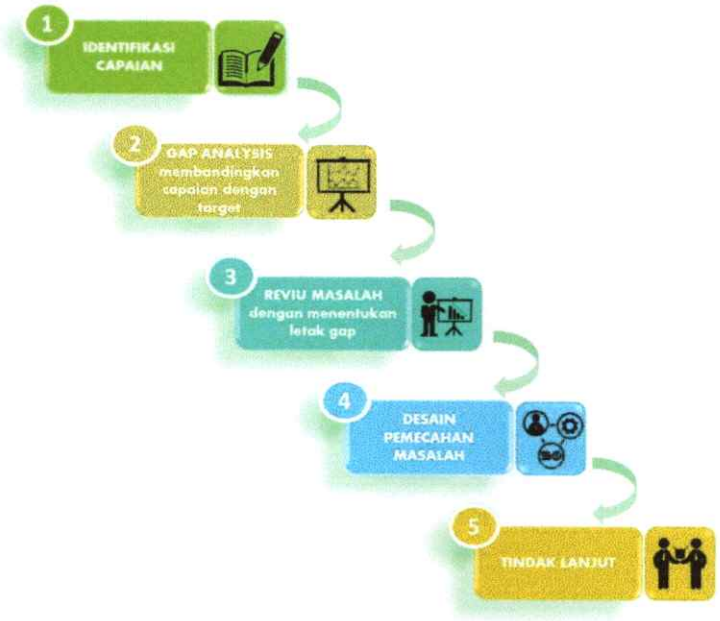
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	86	0	0
	Sasaran	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	86	100	87,75
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	20	0	0
3	Meningkatnya tertib administrasi Desa	Persentase desa tertib Administrasi Desa (%)	91	78,94	86,74

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pelaksanaan Anggaran dan Perencanaan Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

   Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

   1. Kompetensi
   2. Inovasi/kreatifitas
   3. Kepemimpinan
   4. Kinerja/Komitmen

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	85	0	0
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen/ laporan		
	Penyusunan dokumen Perencanaan Pengganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	99.26%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDTersedianya Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	99.63%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayaan publik Pemerintah Daerah	81 Dokumen		
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan	54 orang/bulan	14.24%
	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	0	0
	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40 Dokumen	0	0
	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 laporan	0	0
	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0	0
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 laporan	4 laporan	98.84%
	Koordinasi dan penyusunan laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	18 laporan	0	0

	kuangan bulanan / triwulanan/semesteranSKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		44 paket		
	Penyediaan komponen instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	3	3.11%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	3	6.47%
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	0	20.40%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang tersedia	12 Dokumen	3	15.00%
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 laporan	2	27.30%
	Penyelengggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah ASN yang melaksanankan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 laporan	1	1.52%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritanahan Daerah				
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan laporan	0	0
	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3	9.73%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat	6 unit	1	16.49%
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit		
	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1	21.03%

	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16 Laporan	4	21.62%
	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	16 Laporan	4	21.62%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11lembaga	6	64.72%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	11 laporan	6	64.72%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	4 dokumen	0	0
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Meningkatnya Koordinasi***	26 laporan	0	0

		kegiatan Pemerintahan di tingkaat Kecamatan Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 laporan	0	0
	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	200 orang	0	0
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Jumlah Orang yangMengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Tercapainya Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	57 dokumen	13	36.31%
	Fasilitasi adminitrsasi tata	Jumlah Dokumen yang	19 desa	9	36.31%

	pemerintahan desa	Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	57 Dokumen	14	31.36%

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada capaian kinerja Program Kecamatan Berbek Tahun 2026 telah sesuai dengan target di renja dan renstra yang telah ditetapkan.

a. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026, Pada Realisasi output kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Berbek Tahun 2026 Pada Tribulan I telah tercapai hanya belanja gaji yang kurang maksimal di karenakan ada kekosongan jabatan.

b. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2026
   Mengenai realisasi Keuangan Kecamatan Berbek Tahun 2026 sebesar ***RP.*** **3.360.183.800,00,-** realisasi anggaran **Rp. 477.490.444,00 -** dengan capaian **14.21%**

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1.A Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Sumber daya aparatur kecamatan yang masih kurang memadai dan Kekosongan Jabatan
	sasaran		
a	Indeks Kepuasan mayarakat Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Minimnya efektifitas koordinasi dan sinergi dengan pemanggku kepentingan
b	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (%)	Kesadaran Masyarakat diwilayah Kecamatan tentang pentingnya ketertiban
c	Meningkatnya tertib administrasi Desa	Persentase desa tertib Administrasi Desa (%)	Sebagaian Desa yang belum menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel

III.1.B Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memberikan informasi kinerja yang terukur	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Memberikan informasi kinerja yang terukur	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Pengganggar Perangkat Daerah	Memberikan informasi kinerja yang terukur	
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Memberikan informasi kinerja yang terukur	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan intisar realisasi kinerja SKPD	Memberikan informasi kinerja yang terukur	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyeediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pelaksanaan Penataausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Koordinas dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Koordinasi dan penysunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Koordinas dan penyusunan laporan kuangan bulanan / triwulanan/semesteranSKPD	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Penyediaan komponen instalasi lisrik/ penerangan bangunan kantor	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyelengggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Pengadan peralatan danmesin lainnya	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim pengadaan yang diharuskan pakai aplikasi yang banyak tahapan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritanahan Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Penyeediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi kantor dan Bangunan lainnya	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Koordinasi /erencanan dan pelaksanaan kegiatan Pemerinthan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal

	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Harmonisasi Hubungan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasinal dalam rangka memantapkan pengamalamn Pancasila, pelaksanaa UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	Sistim aplikasi penatausahaan (SIPD) yang belum maksimal
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Fasilitasi adminitrsasi tata pemerintahan desa	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan	
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaansi	

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Masih adanya target yang kurang tepat pada saat perencanaan, sehingga memunculkan capaian kinerja yang melebihi target, dikarenakan kurangnya pemahaman dalam terkait indicator kinerja (*outcame dan output*).

Tujuan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi tribulan I Program Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk mencapai tujuan tersebut program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dievaluasi setiap tribulan.

Evaluasi kegiatan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen untuk melihat tingkat keberhasilan dari sutau proses dan untuk menentukan langkah ke depan. Evaluasi tersebut harus berdasarkan data yang ada, data tersebut didesain sebagai bagian tidak terpisahkan dari suatu proses kegiatan Dalam rangka mengevaluasi kegiatan atau memberi gambaran terhadap kegiatan Kecamatan berbek Kabupaten Nganjuk dilihat dari beberapa segi :

1. Kegiatan
2. Indikator kegiatan
3. Target dan Realisasi Indikator Kegiatan
4. Target dan Realisasi Anggaran Lokasi Kegiatan

IV.2. Tindak Lanjut

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja; ,

b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Berbek secara menyeluruh,efektif, dan efesien

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan I pada tahun 2026, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih tajam lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan. kegiatan telah dilaksanakan, pada triwulan I secara maksimal dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

CAMAT BERBEK

TONI SOESANTO.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.198011231999121003

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				12		13 = 12/7		14=14/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Sinergitas kecamatan(Nilai)	75	2.887.448.918,00	70	2.634.491.525	85	3.047.867.600,00	0	375.066.019,00							0	Rp375.066.019			0	12,99
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (nilai)		2.887.448.918,00		2.634.491.525	70	3.047.867.600,00	0	375.066.019,00							0	Rp375.066.019				12,99
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33	12.587.220,00	8 dokumen	12.192.500	14	3.780.000		2.416.300,00										0,00	0,00	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Rp3.990.000	4 Dokumen	3.775.000	4	Rp1.250.000	4	1.340.300,00							4	Rp1.340.000,00	100,00	99,26	33,33	33,58
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	2.985.500	2 Dokumen	2.935.500	2	1.480.000	1	1.076.300,00							1	Rp1.076.000,00	50,00	99,63	16,66667	35,92
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5.601.720	5 Laporan	5.482.000	4	1.250.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91	Rp2.424.419.300	91 *Dokumen*	2.218.066.421	87	Rp2.744.733.000		0							0	Rp328.762.118	0,00	11,96	0	13,56
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Rp2.403.919.000	12 Orang/bulan	2138602821	18	Rp2.735.875.000	54	327.742.118,00							54	Rp327.742.118	300,00	11,96	81,81818	13,63
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	2.986.000	2Dokumen	2.800.000	2	Rp1.250.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujin/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujin/Verifikasi Keuangan SKPD	120	5.000.000	40 Dokumen	4.958.000	40	2.336.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	3.126.000	4 Dokumen	3.077.000	4	1.030.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Rp3.695.000	1 Laporan	3.584.800	1	Rp1.250.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,00	0	0,00
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12	2.997.300	4 Dokumen	2.408.000	4	1.032.000	4	1.020.000,00							4	Rp1.020.000,00	100,00	98,84	33,33333	34,03

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/ Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				12		13 = 12/7		15=14/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54	Rp 2.896.000	18 Lap	2.636.000	18	Rp1.080.000	0	0							0	-	0,00	0,00	0	0,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	174	27(.349.898	5(*Paket*	224.026.297	44	128.036.600	0	-								Rp15.557.100	0,00	12,1(	0	5,63
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	1(.984.448	1(Paket	15.233.080	10	5.721.100	1	178.000,00							3	Rp178.000,00	30,00	3,1(	10	0,89
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	8(.895.450	5 paket	74.623.975	12	39.439.500	1	2.555.900							3	Rp2.555.900	25,00	6,4(	20	2,98
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	6.700.000	2 paket	1.500.000	2	1.050.000	0	214.200,00							0	Rp214.200	0,00	20,4(	0	2,46
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	3.900.000	24 dokumen	2.270.000	12	2.430.000	1	360.000,00							3	Rp360.000	25,00	15,0(	4,166667	9,23
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	9(.822.500	5 Laporan	90.485.900	5	Rp4.(00.000	1	414.000							2	Rp414.000	40,00	10,3(	40	0,46
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	6(.047.500	12 Laporan	39.913.342	3	36.526.000	1	555.000,00							1	Rp555.000	33,33	1,5(	2,777778	0,83
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216	5(.500.000	72 *Laporan*	33.093.507	72	48.725.000	0	0									0,00	0,0(	0	0,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	180	5.500.000	60 Laporan	5.500.000	60	1.125.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,0(	0	0,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	5(.000.000	12 Laporan	27.593.507	12	Rp45.(00.000	1	4.438.541							3	Rp4.438.541	25,00	9,7(	8,333333	8,88
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	36	15(.692.500	12 *Dokumen*	81.300.800	12	Rp125.203.000	0	5.000.000								Rp5.000.000	0,00	3,9(	0	3,17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	5(.210.600	5 Unit	52.770.400	6	30.375.000	1	23.892.260							1	Rp23.892.260	16,67	78,8(	6,666667	43,27
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	9.990.000	4 unit	9.990.000	4	Rp5.(50.000	0	0							0	Rp0,00	0,00	0,0(	0,00	0,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/ Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				12		13 = 12/7		15=14/5 *100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	9[illegible].491.900	3 Unit	18.540.400	3	89.838.000	[illegible]	18.892.260							1	Rp18.892.260	33,33	21,0[illegible]	11,11	20,43
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16	7[illegible].752.500	16 Laporan	69.449.940	16	43.079.100	4	9.3[illegible]3.750,00							4	Rp9.313.750	25,00	21,6[illegible]	25	13,16
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan [illegible]	48	7[illegible].752.500	16 Laporan	69.449.940	16	43.079.100	4	9.3[illegible]3.750,00							4	9.313.750,00	25,00	21,6[illegible]	8,333333	13,16
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	48	7[illegible].752.500	16 Laporan	69.449.940	16	43.079.100	4	9.3[illegible]3.750,00							4	9.313.750,00	25,00	21,6[illegible]	8,333333	13,16
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1[illegible]	17[illegible].382.500	1[illegible] Laporan	227.624.400	15	80.839.900	[illegible]	16.149.000							0	Rp16.149.000	0,00	19,9[illegible]	0	9,05
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		33	13[illegible].722.500	[illegible] *Laporan*	82.252.400	15	80.839.900	[illegible]	16.149.000							0	16.149.000	0,00	19,9[illegible]	0	12,17
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	33	13[illegible].722.500		82.252.400	7	24.953.750	[illegible]	16.149.000							6	16.149.000	85,71	64,7[illegible]	18,18182	12,17
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	12	13[illegible].722.500	4 Dokumen	32.385.500	4	55.996.150	[illegible]	0							0	Rp0	0,00	0,0[illegible]	0	0,00
	2.Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		78	13[illegible].189.000	26 Laporan	35.605.375	26	61.835.000	[illegible]	-								Rp0	0,00	0,0[illegible]	0	0,00
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (laporan)	78	13[illegible].189.000	26 *Laporan*	35.605.375	26	61.835.000	[illegible]	-								Rp0	0,00	0,0[illegible]	0	0,00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	72	6[illegible].629.000	24 Laporan	62.788.500	24	27.130.000	[illegible]	-								Rp0	0,00	0,0[illegible]	0,00	0,00
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	7[illegible].560.000	2 Laporan	72.816.875	2	34.815.000	[illegible]	-								Rp0	0,00	0,0[illegible]	0,00	0,00

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2026)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran Renja Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
										I		II		III		IV							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10				12		13 = 12/7		15=14/5*100%	
				K	tp	K	Rp	K	Rp	K	tp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100	100.090.000	200 Orang	103.670.000	200	82.110.000	0	Rp0								Rp0	0,00	0,00	0	0,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	600	100.090.000	200 Orang	103.670.000	200	82.110.000	0	Rp0								-	0,00	0,00	0	0,00
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	600	100.090.000	200 Orang	103.670.000	200	82.110.000	0	Rp0								-	0,00	0,00	0	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	19	90.027.100	19 desa	91.292.100	38	44.422.200	0	15.144.200,00							0	Rp15.144.200	0,00	34,09	0	16,28
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa dengan tertib administrasi kelembagaan desa**	57	90.027.100	19 desa	91.292.100	38	44.422.200		15.144.200,00							0	Rp15.144.200	0,00	34,09	0,00	16,28
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19	50.027.100	19 desa	54.524.000	19	24.537.200	9	8.909.200,00							9	8.909.200,00	47,37	36,31	47,36842	15,90
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	57	37.000.000,00	19 desa	36768100	19	19.885.000,00	11	6.235.000,00							4	6.235.000,00	73,68	31,36	24,56	16,85
																			Rata-rata capaian kinerja	24,65	18,46		
																			Predikat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Catatan : *)
Faktor Pendrong Keberhasilan Kinerja :
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Penyerapan anggaran lebih di maksimalkan
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja tahun berikutnya :

Disusun
Berbek, Tanggal 02 April 2026
CAMAT BERBEK

TUNGGUL SANTOSO, S.STP, M.Si
NIP. 19601123 199121003

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
NGANJUK